



LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
DAERAH

2024

DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar bisa menjadi tolak ukur dalam membuat perencanaan pada tahun berikutnya. Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Blitar, 27 Februari 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR



EKO SUSANTO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690701 199703 1 003



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi dan pengukuran kinerja yang efektif bagi upaya dan sarana untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBN/APBD wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, serta Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah diarahkan untuk dapat mengelola dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik melalui penerapan manajemen kinerja yang sesuai dengan TUPOKSI ditiap bidang untuk selanjutnya berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari, sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah menyusun Perencanaan Strategis Tahun 2021 dengan visi : "Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menjalankan misi sebagai berikut: "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan." Untuk dapat mengukur hasil kinerja dari tujuan tersebut maka ditarik beberapa indikator kinerja yang disusun dalam Matrik Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dimana Matriks Renstra ini dijadikan acuan dalam pencapaian

target dari tiap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024. Adapun susunan dari Indikator Kinerja (IK) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah dapat direalisasi sebesar 104% dengan target 70,4/BB dan terealisasi 73,4/BB.
2. Sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. indikator prosentase peningkatan produksi perikanan dapat direalisasi sebesar -5770% dengan target 0,1% dan terealisasi -5,77%
3. Sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator. Indikator prosentase peningkatan produktifitas ternak dapat direalisasi sebesar -113,3% dengan target 0,3% dan terealisasi 0,34%. Indikator Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) dapat direalisasi sebesar 102,7% dengan target 91% dan terealisasi 92,3%, sedangkan indikator prosentase produk peternakan yang layak edar dapat terealisasi sebesar 100,9% dengan target 97% dan terealisasi sebesar 97,9%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	4
C. Dasar Hukum	7
D. Sistematika Dokumen.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Visi dan Misi.....	11
B. Tujuan dan Sasaran	11
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	23
C. Realisasi Anggaran	78
BAB IV. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Pemecahan Masalah	80
C. Tindak Lanjut.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Peternakan dan Perikanan	3
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pokok.....	4
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama.....	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel 2.3	Rincian Anggaran pada Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kerja	22
Tabel 3.2	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kerja	23
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.....	23
Tabel 3.4	Perkembangan Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	24
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	25
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	25
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	28
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	31
Tabel 3.9	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	35
Tabel 3.10	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	35
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	35
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Mening katnya Produksi Hasil Perikanan	46
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktifitas dan kualitas Peternakan	53
Tabel 3.14	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Peternakan	56
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produk tifitas dan Kualitas Peternakan	57



Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Peternakan	58
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Peternakan	72
Tabel 3.18 Realisasi Kinerja dan Keuangan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	3
Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Jaring.....	38
Gambar 3. Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi.....	40
Gambar 4. Pelatihan Olahhan Berbahan Dasar Ikan.....	45
Gambar 5. Outing Class Agro Kelana.....	61
Gambar 6. Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak.....	61
Gambar 7. Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium.....	68
Gambar 8. Pelatihan Budidaya Ternak.....	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

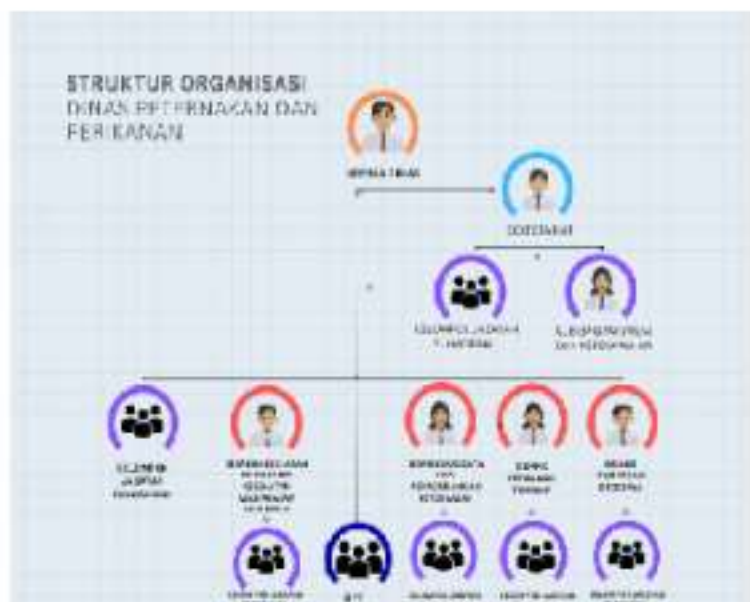
Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan rencana dan program kerja Dinas;
2. Pelaksanaan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan perencanaan dinas serta rumah tangga dinas;
3. Pengawasan penggunaan sarana peternakan dan perikanan;
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan *sustainable development goals* hewan di Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
7. Pelaksanaan koordinasi pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang bersumber dari daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Pelaksanaan koordinasi pengembangan prasarana peternakan, lahan penggembalaan umum;

10. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak di Daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular (*zoonosis*) di Daerah;
12. Pengelolaan pelayanan dan pengembangan laboratorium bidang peternakan dan perikanan serta jasa medik veteriner di Daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi penerapan, pengawasan persyaratan dan pembinaan persyaratan teknis *hygiene* sanitasi kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
14. Pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit hewan dan bencana alam yang berakibat pada hewan;
15. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kegiatan izin usaha peternakan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan serta izin usaha pengecer obat hewan, surat keterangan kesehatan hewan dan produk asal hewan;
16. Pelaksanaan validasi bahan dan menetapkan kebijakan kenelayanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap, usaha kecil pembudidayaan ikan, fasilitasi perizinan usaha pembudidayaan ikan dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
17. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan kenelayanan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
18. Penetapan dan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Daerah;
19. Penetapan kebijakan fasilitasi pengelolaan, mutu, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
20. Pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi program kerja dan kegiatan Dinas;
21. Pelaksanaan fasilitasi program pemerintah pusat dan provinsi terkait bidang peternakan dan perikanan; dan

22. Pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain terkait bidang peternakan dan perikanan yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 70 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar pada tahun 2024.

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	3 Orang
4	Pelaksana	20 Orang

No	Jenis Jabatan	Jumlah
5	Jabatan Fungsional	42 Orang
	Total	70 Orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Produksi perikanan yang fluktuatif	Pengelolaan perikanan tangkap yang belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD)
			Pemberdayaan nelayan kecil yang masih rendah
			Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal
			Pemberdayaan kapal nelayan berukuran sampai dengan 10 GT belum optimal
		Pengelolaan perikanan budidaya belum optimal	Belum optimalnya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan
			Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil masih belum optimal Belum intensifnya pengelolaan pembudidayaan ikan

		Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan belum optimal	Belum adanya pengawasan sumber daya perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum optimal.	Pendampingan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil belum terkelola dengan baik
			Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan belum optimal
Masih rendah produktifitas dan kualitas produk peternakan		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian masih minim	Penyediaan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian kurang optimal.
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, yang belum optimal
			Belum optimalnya peningkatan mutu dan kualitas bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak yang kontinyu dengan harga yang relative stabil
			Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer sehingga aman dan layak dipergunakan
			Kurangnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, serta pakan ternak yang ramah lingkungan dan bebas bahan baku lokal
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum optimal	Pembangunan/penyediaan serta pemeliharaan Prasarana Sub Sektor Peternakan (Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan) belum optimal

			Pengelolaan Wilayah Sumber Ebit Ternak yang belum terkelola
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum optimal	Tingginya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
			Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran hewan beserta produk-produknya belum optimal
			Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam rangka pengobatan penyakit hewan menular strategis belum optimal
			Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam rangka menjamin ketersediaan produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) belum optimal.
			Pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan belum optimal.
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian belum optimal	Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan belum optimal
		Pengelolaan perizinan usaha pertanian belum optimal	Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
			Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan
			Belum optimalnya pelayanan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
		Penyuluhan/ pembinaan sub sektor peternakan belum optimal	Pelaksanaan penyuluhan/ pembinaan sub sektor peternakan belum optimal.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya;
3. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya;
4. Bahan pakan ternak masih import sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi;
5. Fluktuasi harga produk peternakan (telur, daging);
6. Keterbatasan bahan baku pakan ternak (jagung) dan ketergantungan impor (bungkil kedelai);
7. Tingginya permintaan ikan hias khususnya ikan koi;
8. Kurangnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
9. Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi terutama terkait mutu dan keamanan pangan;
10. Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi.
11. Pentingnya pengembangan SDM peternakan
12. Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik);
13. Ketergantungan hasil perikanan tangkap terhadap faktor cuaca dan adanya anomali iklim;
14. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan;

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. TAP MPR RI Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

2. TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
 2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Pemecahan Masalah
- C. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ahklak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”**. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah misi keempat yaitu **“Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan”**.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Peternakan dan Perikanan

a. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sasaran ini adalah Indeks Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Melalui indikator diatas dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sub sektor peternakan dan sektor perikanan.

b. Meningkatnya produksi perikanan

Indikator berupa peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Dari indicator diatas dapat diketahui proses perkembangan pembangunan perikanan di wilayah Kabupaten Blitar. Indikator ini didukung dengan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan pengolahan dan pengawasan usaha perikanan serta

pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Blitar.

c. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan

Produktifitas peternakan menggambarkan peningkatan populasi yang diimbangi dengan kualitas produksi ternak di wilayah Kabupaten Blitar. Indikator ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana peternakan serta pendampingan/ penyuluhan SDM peternak. Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini memberikan gambaran kondisi status kesehatan Kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Hewan. Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar yang di buktikan dengan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam periode 2022- 2026 yang merupakan prasyarat produk peternakan telah siap memasuki perdagangan global modern (siap eksport).

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan					
1	Meningkatny a akuntabilita s kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP Perangkat Daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspekto rat	Kepala Dinas
2.	Meningkatny a produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya,	Bidang Perikana n Tangkap Bidang	Kepala Dinas

			dengan rumusan Produksi thn n - Produksi thn n-1 x100 % Produksi thn n-1	dan Bidang Perikanan Budidaya	
3.	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktivitas peternakan	Peningkatan produktifitas ternak (perbandingan produksi ternak dengan populasi ternak), dengan rumusan: Produktifitas thn n - Produktifitas thn n-1/ Produktifitas tahun n-1 X 100%	Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan, Bidang Kesehatan hewan dan Kesmavet	Kepala Dinas
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Kepala Dinas

			strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar, dengan rumusan: Jumlah desa yang terkendali/ Jumlah total desa di Kabupaten Blitar x 100%		
		Persentase Produk Peternakan yang Layak Edar	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi, dengan jumlah produk yang diawasi rumusan: Jumlah produk layak edar/ Jumlah produk	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Kepala Dinas

			yang diawasi x 100%		
--	--	--	------------------------	--	--

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Elitar Tahun 2024 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.2
 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Indikator SAKIP Perangkat Daerah	70,1/BB
2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	0,1%
3	Meningkatnya produktivitas dan kualitas peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,3%
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	91%
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	97%

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 19.083.014.900,- dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.231.082.475,00	9.852.352.607,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.538.45,00	3.117.102,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.852.812,00	1.852.812,00
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.685.646,00	1.264.290,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.727.023.674,00	8.306.791.115,00
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.705.233.459,00	8.284.040.900,00
2.2	Pelaksanaan Peratussahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20.340.000,00	21.300.000,00
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	526.806,00	526.806,00
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	355.200,00	355.200,00
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	568.209,00	568.209,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.712.913,00	179.495.958,00
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	587.412,00	587.412,00
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.674.632,00	17.909.009,00
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.607.369,00	23.051.037,00
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.843.500,00	137.948.500,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.572.290,00	14.789.640,00
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.572.290,00	14.789.640,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.732.140,00	1.211.412.140,00
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.777.500,00	1.777.500,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.524.400,00	153.610.030,00
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.340.000,00	4.235.000,00
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.090.240,00	1.036.080.240,0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.503.000,00	136.746.652,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Fajek dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.722.500,00	130.966.152,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.780.500,00	5.780.500,00
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	113.935.530,00	289.492.836,00
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	23.000.000,00	23.000.000,00
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	82.935.530,00	258.492.836,00
2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	65.935.288,00	240.752.594,00
2.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	14.000.242,00	14.740.242,00
2.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	3.000.000,00	3.000.000,00
II	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	295.000.000,00	335.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	203.000.000,00	243.000.000,00
1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	190.300.000,00	230.300.000,00
1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.700.000,00	2.700.000,00
2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	92.000.000,00	335.000.000,00
2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.000.000,00	7.000.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000,00	40.000.000,00
2.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	25.000.000,00
2.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.000.000,00	15.000.000,00
III	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.960.000,00	9.960.000,00
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	9.960.000,00	9.960.000,00
1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	4.960.000,00	4.960.000,00
IV	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	28.991.733,00
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.000.004,00	5.000.004,00
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.004,00	5.000.004,00
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.357.581,00	11.357.581,00
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.357.581,00	11.357.581,00
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12.634.148,00	12.634.148,00
3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.754.148,00	9.754.148,00
3.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
	Kabupaten/ Kota		
V	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.137.166.271,00	1.003.248.165,00
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	824.667.048,00	749.667.048,00
1.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	818.615.098,00	743.615.098,00
1.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	818.615.098,00	6.051.950,00
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	217.499.531,00	158.581.425,00
2.1	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	217.499.531,00	158.581.425,00
3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	4.999.960,00	4.999.960,00
3.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	4.999.960,00	4.999.960,00
4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.999.732,00	89.999.732,00
4.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	89.999.732,00	89.999.732,00
VI	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.700.100.020,00	4.940.100.020,00
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.700.100.020,00	4.940.100.020,00
1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000,00	317.245.000,00
1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	400.000.000,00	431.000.000,00
1.3	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.000.100.020,00	4.191.855.020,00
VII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.599.187.158,00	2.498.182.455,00
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.999.182,00	19.999.182,00
1.1	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	9.999.640,00	9.999.640,00
1.2	Felaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3	Felaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	4.999.542,00	4.999.542,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.999.980,00	9.999.980,00
2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	9.999.980,00	9.999.980,00
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.424.850.501,00	2.371.241.821,00
3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	137.951.128,00	84.341.821,00
3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2.286.899.373,00	2.286.900.000,00
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15.004.071,00	35.281.863,00
4.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.004.184,00	10.956.184
4.2	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.999.907,00	5.406.167,00
4.3	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	4.999.980,00	18.919.512,00
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	129.333.424,00	61.659.609,00
5.1	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	129.333.424,00	61.659.609,00
IX	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.499.720,00	7.499.720,00
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	7.499.720,00	7.499.720,00
1.1	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	7.499.720,00	7.499.720,00
X	Program Perizinan Usaha Pertanian	9.999.552,00	4.999.960,00
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4.999.960,00	4.999.960,00
1.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	4.999.960,00	4.999.960,00
2	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	4.999.592,00	0
2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	4.999.592,00	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)
XI	<i>Program Penguluh Pertanian</i>	320.000.000,00	113.187.404,00
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	320.000.000,00	113.187.404,00
1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	320.000.000,00	113.187.404,00
		19.452.922.459,00	19.083.014.900,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	104%	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya produksi hasil perikanan	-5770%	Sangat rendah
3.	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	105,6%	Sangat tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025 Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 104%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah.

Tabel 3.3

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai dan predikat SAKIP	70,1/BB	73,4/BB	104

kinerja perangkat Daerah	perangkat daerah			
Capaian Kinerja				104%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah. Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah merupakan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah dapat direalisasi sebesar 104% dengan target 70,1/BB dan terealisasi 73,4/BB.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan adanya penyesuaian standar penilaian oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3.4

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	88,5/A	81,47/A	73,4/BB

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel 3.5

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah terhadap target jangka menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun n	Persentase capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80/A	73,4/BB	91,25%

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan kedepannya. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Tahun 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	73,4/BB	84,5/A

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Program ini mencakup kegiatan perencanaan, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang miki daerah, penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Indikator program ini adalah rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata capaian kinerja kegiatan.

Program ini didukung beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu penyusunan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 95% dan dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 95% melalui sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 90% melalui sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja 94% melalui sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam memantau capaian kinerja;
2. Masih banyaknya pegawai yang belum memahami secara mendalam konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);
3. Masih rendahnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 9.852.352.607,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.516.748.262,- Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

Tabel 3.7

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	104%	Program Penunjang	9.852.352,60	9.516.748,26	96,59
			Urusan	7,00	2,00	
			Pemerintahan			
			Daerah Kabupaten/ Kota			
			Kegiatan	3.117.102,00	3.002.160,00	96,31
			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan	1.852.812,00	1.810.960,00	97,74
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan	1.264.290,00	1.191.200,00	94,22
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Kegiatan	8.306.791,11	8.010.124,05	96,43			
Administrasi	5,00	8,00				
Keuangan Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	8.284.040,90	7.987.379,35	96,42			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	0,00	8,00				
Sub Kegiatan	21.300.000,0	21.300.000,0	100,0			
Pelaksanaan	0	0	0			
Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD						
Sub Kegiatan	526.806,00	525.540,00	99,76			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	355.200,00	351.600,00	98,99
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	568.209,00	567.560,00	99,89
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.495.958, 00	174.581.249, 00	97,26
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	587.412,00	576.000,00	98,06
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.909.009,0 0	15.963.000,0 0	89,13
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.051.037,0 0	21.671.000,0 0	94,01
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.948.500, 00	136.371.249, 00	92,01
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.789.640,0 0	14.400.000,0 0	97,37
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.789.640,0 0	14.400.000,0 0	97,37
			Kegiatan Penyediaan	1.211.412.14	1.178.109.11	97,25

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	5,00	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.777.500,00	1.650.000,00	92,83
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.610.030, 00	153.610.030, 00	90,72
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.235.000,00	3.250.000,00	76,74
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.036.080.24 0,0	1.019.599.08 5,00	98,41
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.746.652, 00	136.531.680, 00	99,84
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.966.152, 00	130.806.180, 00	99,88
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.780.500,00	5.725.500,00	99,05
			Realisasi Anggaran	9.852.352.6 07,00	9.516.748. 262,00	96,59

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tingkat efisiensi			1,08%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 104% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 96,59%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 1,08% dengan kategori efisien.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Mengembangkan layanan peternakan dan perikanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi;
2. Memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik tiap bulan;

2. Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Dalam sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar -5770%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan.

Tabel 3.8

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produksi hasil	Prosentase peningkatan	0,1%	-5,77%	-5770

	perikanan	produksi perikanan			
Capaian Kinerja					-5770

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu prosentase peningkatan produksi perikanan. Prosentase peningkatan produksi perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan atau kenaikan hasil produksi perikanan dalam suatu periode tertentu, biasanya dibandingkan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya. Nilai ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan mencerminkan efektivitas program atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sektor perikanan. Berdasarkan tabel 3.7 diatas, indikator prosentase peningkatan produksi perikanan dapat direalisasi sebesar -5770% dengan target 0,1% dan terealisasi -5,77%

Prosentase peningkatan produksi perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan atau kenaikan hasil produksi perikanan dalam suatu periode tertentu, biasanya dibandingkan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya. Nilai ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan mencerminkan efektivitas program atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sektor perikanan.

Pada tahun 2024 prosentase peningkatan produksi perikanan yang ditargetkan meningkat sebanyak 0,1% pada realisasinya mengalami penurunan sebesar 5,77%. Penurunan ini terjadi akibat turunnya produksi perikanan tangkap laut dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan prosentase peningkatan produksi perikanan didasarkan pada gabungan antara peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan budidaya pada tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu, penurunan signifikan pada produksi perikanan tangkap menyebabkan secara keseluruhan capaian produksi perikanan mengalami penurunan.

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan alami, seperti

laut, sungai, danau, waduk, rawa, atau genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan. Produksi ini mencakup semua jenis ikan, udang, cumi, kepiting, dan hasil laut lainnya yang ditangkap oleh nelayan menggunakan alat tangkap tertentu, baik secara tradisional maupun modern, baik perikanan tangkap laut maupun Perikanan Umum Darat (PUD).

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2024



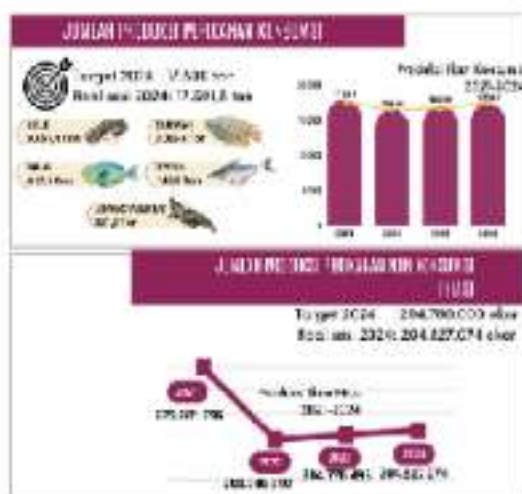
mengalami penurunan sebesar 14,35%. Penurunan ini terjadi karena adanya cuaca ekstrem pada akhir Tahun 2024, yang menyebabkan banyak nelayan tidak dapat melaut. Selain itu, pada Tahun 2024, banyak nelayan yang beralih untuk menangkap ikan dengan nilai produksi yang lebih tinggi.

Sehingga meskipun produksi menurun, akan tetapi nilai produksi ikan laut meningkat tajam. Sedangkan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2021 sampai dengan 2023, jumlah produksi perikanan tangkap sangat fluktuaktif akibat cuaca. Di tahun 2022 jumlah produksi perikanan tangkap menurun secara drastis akibat adanya *La Nina*, curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim dapat menghambat kegiatan nelayan untuk melaut. Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir karena adanya fenomena *El-Nino*, kemarau panjang sangat mendukung kegiatan nelayan untuk melaut sehingga produksi perikanan tangkap sangat melimpah dibandingkan tahun 2022.

Produksi perikanan budidaya merupakan hasil produksi dari kegiatan pembudidayaan yang terdiri dari produksi ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan konsumsi dipelihara di beberapa jenis pemeliharaan diantaranya di kolam, dengan sistem mina padi, keramba, jaring apung dan tambak. Pada tahun 2024 target ikan konsumsi adalah sebesar 17.300 ton dan terealisasi sebesar 17.301,3 ton (100%). Peningkatan produksi perikanan konsumsi ini dipengaruhi adanya peningkatan

produksi budidaya dengan sistem tambak dan kolam. Hal ini disebabkan musim penghujan di Tahun 2024 yang menjadikan pasokan air melimpah. Air yang cukup membantu menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan budidaya dengan sistem kolam. Selain itu peningkatan produksi perikanan konsumsi ini dipengaruhi dengan meningkatnya permintaan pasar akan ikan nila. Ikan nila memiliki harga yang relatif stabil dan terjangkau, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Stabilitas harga ini mendorong pembudidaya untuk terus meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan pasar yang meningkat.

Produksi ikan hias pada tahun 2024 mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2023. Dari target sebesar 204.780.000 ekor terealisasi sebesar 204.827.074 ekor atau sebesar 100,02% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 saat pandemi produksi ikan hias



di Kabupaten Blitar memang mengalami penurunan drastis dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2023, produksi ikan hias mengalami peningkatan sedikit di tahun 2024. Pada tahun 2023 budidaya koi menjadi titik awal bahwasanya pada tahun

tersebut pembudidaya ikan koi memang orang yang memiliki hobi terhadap ikan koi saja. Namun, di tahun 2024, produksi ikan koi mulai menunjukkan kenaikan meskipun belum signifikan. Hal ini didorong oleh perlahan pulihnya permintaan pasar terhadap ikan hias, serta upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menggiatkan kembali event seperti **Koi Show**, yang berperan penting dalam meningkatkan pemasaran dan membangkitkan antusiasme masyarakat terhadap.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3.9

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	-22,46%	72,71%	-5,77%

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.10

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	0,7%	-5,77%	-823%

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, peningkatan produksi perikanan juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan produksi ini juga terjadi untuk produksi perikanan khususnya perikanan tangkap dimana pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur sebanyak 586.137 Ton dan pada tahun 2024 sebanyak 576.991 Ton. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.11

Perbandingan capaian kinerja meningkatnya produksi hasil perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun	Realisasi Provinsi/	Realisasi dengan
-----	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	------------------

			2024	Nasional Tahun 2024	Daerah Lain
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	-5,77%	-1,5%	1,62% (Kabupaten Magetan)

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 dengan indikator jumlah produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 3.553 ton, namun realisasinya mencapai 3.093 ton atau sebesar 87,07% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini akibat pengaruh cuaca ekstrim yang tidak dapat dikendalikan sehingga membatasi aktivitas penangkapan ikan di laut. Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap baik di laut maupun di PUD serta untuk meningkatkan perekonomian sektor perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan melalui program pengelolaan perikanan tangkap melaksanakan:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan dengan target sebanyak 10 nelayan dan bisa tercapai sesuai target yaitu sebanyak 12 nelayan (120%) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bengawan Makmur Desa Mronjo Kecamatan Selopuro. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - a) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk buku saku data dan informasi sumber daya ikan.

- b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, sub kegiatan ini dilaksanakan melalui restocking ikan. Tujuan *restocking* adalah untuk menambah populasi ikan khususnya ikan asli Perairan Umum Daratan (PUD) yaitu ikan tawes dan tombro serta mempertahankan kelestarian ikan asli wilayah Perairan Umum Daratan (PUD). Target sub kegiatan ini sebanyak 1 (satu) paket *restocking* dan tercapai 1 (satu) paket *restocking* benih ikan (100%) yang dilaksanakan di Sungai Jati Desa Mronjo. 1 (satu) paket *restocking* tersebut terdiri dari 44.950 ekor bibit ikan tawes berukuran 3-5 cm dan 22.300 ekor bibit ikan tombro.
- 2) Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan, baik pengetahuan, keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi risiko usaha, mampu memanfaatkan
- asas skala ekonomi dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha. Indikator kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota yaitu jumlah nelayan kecil yang diberdayakan, dengan target 175 orang dan realisasi sebanyak 202 orang.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil melalui sosialisasi pemanfaatan Kalaju, diversifikasi usaha nelayan (pelatihan olahan berbahan baku garam), pelatihan pembuatan jaring udang dan pelatihan pembuatan jala tebar dengan realisasi sebanyak 145 orang. Sub kegiatan ini memiliki tujuan strategis untuk memberikan fasilitasi mata pencaharian alternatif bagi nelayan, terutama saat menghadapi cuaca buruk, sekaligus



meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan di Kabupaten Blitar.



Gambar 2. Pelatihan pembuatan jaring udang dan pelatihan pembuatan jala tebar

- b) Sub Kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan nelayan kecil melalui pembinaan kepada 47 kelompok dari KUB, Pokmaswas dan Pohlasar di Kabupaten Blitar. Sub kegiatan ini bertujuan mendorong bertambahnya kelompok pendukung perikanan tangkap yang aktif, kuat dan mandiri sehingga diharapkan bisa tersedia sumber daya ikan yang lestari dan



berkelanjutan. Dorongan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pendukung perikanan tangkap yaitu KUB, Pokmaswas dan Poklahsar.

- c) Sub kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha dengan melaksanakan pendampingan verifikasi bantuan pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang diberikan kepada kelompok dengan realisasi sebanyak 10 unit yang difasilitasi.

3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI; kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan

fasilitas aktifitas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tambakrejo dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap laut dengan indikator jumlah produksi perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada tahun 2024, sebagai upaya antisipasi menghadapi dampak cuaca ekstrem bagi para nelayan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Elitar memfasilitasi pelaksanaan



Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) bekerja sama dengan BMKG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nelayan terkait informasi cuaca maritim sehingga mereka dapat lebih siap dan aman dalam melaut. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- 4) Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah kapal yang didaftar pada tahun 2024 sebanyak 46 kapal.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya: Sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dengan pemberian pelatihan budidaya ikan gurami, pelatihan budidaya maggot, dan pelatihan budidaya ikan lele dengan realisasi sebanyak 7 kelompok dengan jumlah keseluruhan 70 orang pembudidaya. Selain itu, untuk meningkatkan minat pasar akan ikan koi Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan

fasilitasi Selain kegiatan tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi ikan hias pada tahun 2024 memberikan fasilitasi dalam acara “Blitar Koi Show” yang diselenggarakan pada 25-27 Oktober 2024 bertempat di Pendopo Sasana Adhi Praja Kanigoro Blitar. Melalui event tersebut diharapkan dapat tercipta peluang kemitraan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta memperluas pasar ikan koi lokal hingga ke tingkat nasional dan internasional.



Gambar 3. Pelatihan budidaya ikan konsumsi

- b) Sub kegiatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil, dengan memberikan fasilitasi dan dukungan kepada kelompok pembudidaya ikan kecil (Pokdakan) melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan pada Pokdakan Mina Kedung Kedungbunder Sutojayan, Betha Muliya Kebonagung Wonodadi, Sakana Sukorejo Udanawu, D'Terong Koi Farm Garum dan Mina Tirta Langgeng Sidorejo Doko. Indikator capaian dari sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kelompok, realisasinya berhasil melampaui target dengan capaian sebanyak 5 kelompok.
- c) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha melalui sosialisasi Program Kredit (KUR) dari BRI, yang dirancang khusus untuk para pembudidaya ikan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembudidaya tentang fasilitas perbankan yang tersedia, khususnya kredit modal usaha, yang dapat mendukung peningkatan usaha budidaya ikan dengan sasaran Pokdakan

D'Terong Koi Farm dan Muda Berkarya Kebonsari Kelurahan Garum Kecamatan Garum. Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha telah memfasilitasi 2 kelompok pembudidaya Ikan untuk mengakses bantuan modal usaha dari target 2 kelompok sehingga capaiannya sebesar 100 %. Adapun 2 kelompok/pokdakan.

- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang didukung dengan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub kegiatan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota berupa laporan penyajian data-data yang dihasilkan dari kegiatan pendataan perikanan budidaya dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem, yang dibedakan sesuai jenis komoditi, yakni ikan konsumsi dan ikan hias. Pendataan ini terintegrasi dengan NIK pembudidaya, sehingga data dapat diinput dengan cepat, akurat, dan otomatis tercatat dalam sistem.
 - b) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pengadaan kolam bulat untuk pemeliharaan calon induk di Unit Pembenihan Ikan (UPI) Babadan, Wlingi.
 - c) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan 2 (dua) paket pakan ikan yang disalurkan untuk UPI Babadan dan UPI Klemunan. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UPI dalam menghasilkan benih ikan berkualitas, sehingga mampu mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Blitar.
 - d) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota melalui dokumen Laporan Hasil Uji (LHU). Dokumen-dokumen LHU tersebut merupakan hasil dari pengujian kualitas air dan lingkungan budidaya, monitoring residu obat ikan, serta pengawasan penggunaan obat ikan berbahan kimia berbahaya. Pada tahun 2024, kegiatan ini tercapai sebanyak 54 Dokumen LHU (Laporan Hasil Uji).

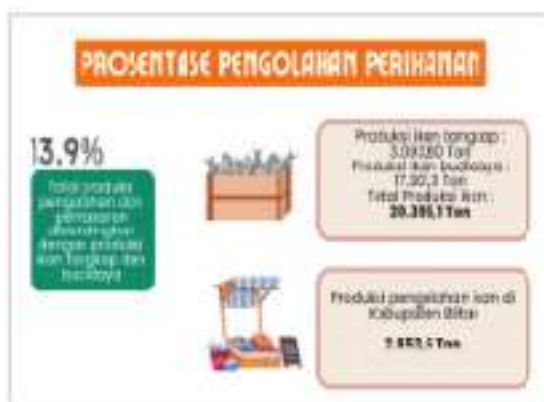
- e) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat melalui pelatihan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang diberikan pada Pokdakan Sirba Koi, serta fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendukung budidaya yang diberikan pada Pokdakan Ulam Ageng Lestari, Sabar Subur, Tirta Gemilang, Sumber Arum, Sumber Rejeki.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; program ini berupa kegiatan pengawasan pada pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya nelayan pada Perairan Umum Darat (PUD) dan pembudidaya ikan. Pada tahun 2024 jumlah nelayan yang diawasi adalah sebanyak 16 nelayan dengan sasaran Daerah Aliran Sungai Mronjo, Pokmaswas Bonang Tirto Lestari, Daerah Aliran Sungai Brantas Desa Ngembul dan Desa Tawangrejo Kec. Binangun, Pembinaan Pokmaswas di Kelurahan Satreyan Kec. Kanigoro dan Kelurahan Kembangarum Kec. Sutojayan, Bersih-bersih kali bagian hulu bendungan Wlingi di Sungai Jari Desa Mronjo. Sedangkan untuk pembudidaya ikan yang diawasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 pembudidaya ikan dari Pokdakan Sumber Tirta Purwitosari, Berkah Manunggal, Karya Bakti, Tawang Sari Indah Koi, Mina Sumberarum, Sahabat Koi, Maju Jaya Kedawung, Bina Galor, Pandanarum Gurame, Orifish Bangsri, jatiluhur Barokah, Kawulo Sakti, dan Mina Sumber Rejeki.

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki indikator berupa prosentase peningkatan produksi Perairan Umum Darat (PUD). Target yang ditetapkan sebanyak 5%, namun realisasi yang berhasil dicapai sebesar 4,45%, dengan rincian produksi Perairan Umum Darat (PUD) meningkat dari 305,2 ton pada tahun sebelumnya menjadi 318,8 ton pada tahun ini.



Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh maraknya aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di beberapa aliran sungai selama musim penghujan akhir tahun. Dari hasil pantauan Dinas Peternakan dan Perikanan, *illegal fishing* terdeteksi di aliran Sungai Brantas di wilayah Satriyan Kanigoro, Kaulon Sutojayan, Ngembul Binangun, dan Jugo Kesamben. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota.

- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha



perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha

perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Indikator dari program ini yaitu prosentase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 12% dan bisa tercapai sebanyak 13,9%. Program ini didukung beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui *updating* data statistik pendataan pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Blitar. Unsur yang di data dalam pendataan tersebut adalah komoditi, kapasitas produksi, asal produk dan wilayah pemasaran serta pendataan harga bahan baku dan harga jual. Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan

dari 101 sampel yang ada, 86 sampel aktif dan 15 sampel lainnya tidak aktif.

- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengeolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang diwujudkan melalui kegiatan bimbingan dan pendampingan perizinan usaha yang dilaksanakan di wilayah Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, pada tanggal 7 Mei 2024 dengan peserta sejumlah 40 unit usaha. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a) Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan. Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan kegiatan gemarikan di wilayah berpotensi stunting dengan melibatkan peserta 20 yang terdiri dari ibu hamil dan menyusui pada tanggal 09 Oktober 2024. Kegiatan ini diisi dengan pelatihan olahan berbahan baku ikan untuk meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.
 - b) Sub kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan pendampingan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Ori Fish Bangsri, Nglegok. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 pelaku usaha perikanan dan bisa tercapai 100 % yaitu sebanyak 1 pelaku usaha perikanan.



Gambar 4. Pelatihan olahan berbahan baku ikan

Selain program di atas, dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan juga melakukan inovasi pelayanan sebagai berikut :

1. Mobil Layanan

Mobil Layanan merupakan rebranding dari inovasi Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023 yaitu Molase "Mobile Laboratory Service" yang menerapkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan secara aktif dengan datang langsung ke lokasi guna mempercepat penanganan masalah penyakit ikan dan lingkungan. Rebranding tersebut dilakukan sejak 7 Maret 2024 dengan merubah Molase menjadi Mobil Layanan dengan sasaran tidak saja kesehatan ikan namun juga kesehatan hewan ternak. Mobil Layanan ini merupakan mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pelayanan keliling di Kecamatan setiap satu minggu sekali. Dengan adanya Mobil Layanan Disnakan diharapkan masyarakat dapat mengakses info atau berkonsultasi terkait pelayanan-pelayanan yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan.

2. Café Layanan

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar, pada 7 Maret 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan meresmikan Café Layanan Disnakan. Inovasi Café Layanan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, yang sebelumnya masyarakat harus mendatangi bidang-bidang tertentu sekarang cukup di Café Layanan. Café Layanan ini

berada di depan kantor Dinas Peternakan dan Perikanan dan buka setiap hari.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh fluktuasi cuaca dan perubahan iklim terhadap produksi perikanan. Cuaca ekstrim, terutama yang disertai angin kencang, gelombang tinggi, dan badai, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan produksi perikanan tangkap;
2. Masih rendahnya permintaan pasar terhadap ikan hias terutama ikan koi;
3. Tingginya harga pakan ikan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual ikan;
4. Keterbatasan akses pemasaran produk hasil olahan perikanan.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya meningkatnya produksi hasil perikanan adalah sebesar Rp. 663.444.569,- dengan realisasi sebesar Rp. 602.373.382,- Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya meningkatnya produksi hasil perikanan.

Tabel 3.12

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	-5770%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	289.492.836,00	273.650.900,00	94,53
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air	23.000.000,00	22.274.500,00	96,85

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.000.000,00	2.985.000,00	99,50
			Sub Kegiatan Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	20.000.000,00	19.289.500,00	96,45
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	258.492.836,00	243.643.950,00	94,26
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	240.752.594,00	226.040.950,00	93,89
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	14.740.242,00	14.688.000,00	99,65
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3.000.000,00	2.915.000,00	97,17
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)	5.000.000,00	4.992.500,00	99,85
			Sub Kegiatan Pelayanan	5.000.000,00	4.992.500,00	99,85

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penyelenggaraan Tempat Pelanggan Ikan (TPI)			
			Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	2.740.000,00	99,87
			Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampel dengan 10 GT	3.000.000,00	2.740.000,00	91,33
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	335.000.000,00	290.416.932,00	86,69
			Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	243.000.000,00	203.558.732,00	83,77
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	230.300.000,00	191.128.732,00	82,99
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	10.000.000,00	9.784.000,00	97,84
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas	2.700.000,00	2.646.000,00	98,00

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	335.000.00,00	290.416.932,00	86,69
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.000.000,00	6.998.500,00	99,98
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000,00	4.710.000,00	94,20
			Sub Kegiatan Perjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000,00	39.650.500,00	99,13
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000,00	20.726.000,00	82,90
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15.000.000,00	14.773.200,00	98,49
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.960.000,00	9.760.000,00	97,99
			Kegiatan Pengawasan Sumber	9.960.000,00	9.760.000,00	97,99

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota			
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	28.545.500,00	98,46
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.000.004,00	4.998.000,00	99,96
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha	5.000.004,00	4.998.000,00	99,96

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.357.581,00	10.982.500,00	96,70
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.357.581,00	10.982.500,00	96,70
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12.634.148,00	12.565.000,00	99,45
			Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.754.148,00	9.685.000,00	99,29
			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Realisasi Anggaran	663.444.569,0 0	602.373.3 82,00	90,79 %
			Tingkat efisiensi			-63%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar -5770% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90,79%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan dengan nilai efisiensi sebesar -63%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Mendorong nelayan untuk melakukan usaha alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada hasil tangkap laut;
2. Peningkatan promosi dan edukasi pasar untuk ikan hias;
3. Pelatihan pengolahan pakan mandiri untuk mengimbangi harga pakan yang tinggi;
4. Mendorong sertifikasi produk olahan seperti SNI, BPOM, dan halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

3. Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Produk Peternakan

Dalam sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan dapat diperoleh nilai capaian kerjanya sebesar 105,6%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan.

Tabel 3.13

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,3%	0,34%	113,3
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)	91%	92,3%	102,7
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	97%	97,9%	100,9
Capaian Kinerja					105,6

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Indikator Prosentase peningkatan produktifitas ternak merupakan kenaikan produktivitas ternak dalam satuan persen (%) yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Indikator Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) merupakan perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Elitar.

- c. Indikator Prosentase produk peternakan yang layak edar merupakan perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi, dengan jumlah produk yang diawasi.

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, indikator prosentase peningkatan produktifitas ternak dapat direalisasi sebesar -113,3% dengan target 0,3% dan terealisasi 0,34%. Indikator Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) dapat direalisasi sebesar 102,7% dengan target 91% dan terealisasi 92,3%, sedangkan indikator prosentase produk peternakan yang layak edar dapat direalisasi sebesar 100,9% dengan target 97% dan terealisasi sebesar 97,9%.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan, jika dianalisa dari capaian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tingkat capaian indikator peningkatan produktifitas ternak di tahun 2024 mengalami peningkatan bertahap yang signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang mengganggu produktivitas ternak seperti susu sapi perah yang tidak dapat berproduksi saat ternak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sedangkan di tahun 2024 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah dapat terkendali sehingga produktivitas ternak menunjukkan peningkatan, meskipun pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember di Kabupaten Blitar mulai mewabah kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Indikator Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan berhasil mencapai realisasi indikator pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 92,3%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM kita yang mumpuni dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Menular



Strategis (PHMS) di Kabupaten Blitar. Dari total 248 desa dan kelurahan, sebanyak 229 wilayah bebas kasus atau terkendali dengan kematian nihil, meskipun masih terdapat 19 wilayah terdampak dengan kasus kematian. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 prosentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis mengalami peningkatan, dikarenakan pada tahun 2023 tidak hanya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak akan tetapi juga terdapat penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD).

Wilayah terdampak PHMS Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Kasus Kematian
1	Ds. Kaligambir Kec. Panggungrejo	1 Kasus
2	Ds. Sidodadi Kec. Garum	1 Kasus
3	Ds. Sawentar Kec. Kanigoro	1 Kasus
4	Ds. Jeblog Kec. Talun	1 Kasus
5	Ds. Butun Kec. Gandusari	1 Kasus
6	Ds. Rejoso Kec. Binangun	3 Kasus
7	Ds. Ngaringan Kec. Gandusari	2 Kasus
8	Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon	1 Kasus
9	Ds. Birowo Kec. Binangun	5 Kasus
10	Ds. Kedawung Kec. Nglegok	1 Kasus
11	Ds. Bacem Kec. Ponggok	1 Kasus
12	Ds. Serang Kec. Panggungrejo	4 Kasus
13	Ds. Maron Kec. Kademangan	1 Kasus
14	Ds. Kunir Kec. Wonodadi	1 Kasus
15	Ds. Kaulon Kec. Sutojayan	1 Kasus
16	Ds. Bence Kec. Garum	1 Kasus
17	Ds. Sukosewu Kec. Gandusari	2 Kasus
18	Ds. Sumberasri Kec. Nglegok	6 Kasus
19	Ds. Panggungasri Kec. Panggungrejo	1 Kasus

Indikator prosentase produk peternakan yang layak edar menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 97%, Kabupaten Blitar berhasil merealisasikan 97,9%. Prosentase ini merupakan hasil perbandingan antara produk peternakan yang layak edar dengan total jumlah produk yang diawasi.

Adapun untuk produk yang tidak layak edar, seperti daging ayam yang positif terkontaminasi salmonella, Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan langkah pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya terkait penerapan sanitasi dan hygiene. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita dalam menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar.

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah total produk	Jumlah layak edar	Perlu Tindak Lanjut	Keterangan Hasil
1.	Pengawasan bahan asal hewan (sampel produk pangan asal hewan, daging ayam, daging sapi, telur, susu, bakso, sosis, nugget)	52	51	1	Ada 1 produk positif salmonella
2.	Pengawasan pemolongan hewan RPH	2.490	2.381	109	Organ disendikan dan layak konsumsi
3.	Pengawasan pemolongan hewan kurban	18.217	17.888	331	Organ disendikan dan layak konsumsi
JUMLAH		20.757	20.318	441	
		Prosentase	97,9%	2,1%	

Meskipun menghadapi tantangan berupa mewabahnya kasus Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap produk peternakan yang beredar. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa produk peternakan yang layak edar di Kabupaten Blitar tetap melebihi target yang telah ditentukan.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3.14

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,16%	0,21%	0,34%
		Prosentase wilayah yang terkendali	Na	91%	92,3%

		dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)			
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	95,05%	97%	97,9%

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024. terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.15

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,5%	0,34%	68%
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	80%	92,3%	115%

		strategis (PHMS)			
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	98,2%	97,9%	99%

Capaian indikator prosentase peningkatan produktivitas ternak dan prosentase produk peternakan layak edar tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di Provinsi Tahun 2024 dikarenakan di Provinsi Jawa Timur menggunakan indikator Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan sedangkan di daerah lain menggunakan indikator peningkatan produksi ternak. Perbandingan capaian kinerja hanya bisa dibandingkan untuk indikator prosentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dibandingkan dengan realisasi nasional pada tahun 2024 sebesar 80,62%. Prosentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) nasional ini berdasarkan hitungan perbandingan jumlah kab/kota yang terkendali PHMS dibandingkan jumlah kab/kota yang terdampak PHMS. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.16

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,34%	-
		Prosentase	92,3%	80,62

		wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)		
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	97,9%	-

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini memiliki indikator kinerja berupa prosentase peningkatan penyediaan bibit ternak. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,29% dari yang ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,3% yang diperoleh total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini (41.187) dibandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2023 (41.067). Program ini didukung melalui kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

a) Sub kegiatan peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman, yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan hibah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran DPRD kepada 6 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Margo Makmur, kelompok Tani Merdeka, Kelompok

Tani Margo Mulyo, Kelompok Tani Syukur Tani, Kelompok Tani Setia Budi, Kelompok Tani Rojo Koyo Mandiri.

No	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	Volume	Mekanisme Usulan
1	Kelompok Tani Margo Makmur	Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo	Sukamdi	51 Ekor	Musrenbang
2	Kelompok Tani Merdeka	Desa Birowo, Kecamatan Binangun	Tri Eko	29 Ekor	Musrenbang
3	Kelompok Tani Margo Mulyo	Desa Dawruhan, Kecamatan Kademangan	Mubah Rodin	17 Ekor	Pokir
4	Kelompok Tani Syukur Tani	Desa Dawruhan, Kecamatan Kademangan	Suwandi	17 Ekor	Pokir
5	Kelompok Tani Setia Budi	Desa Duren, Kecamatan Talun	Mujiono	35 Ekor	Pokir
6	Kelompok Tani Rojo Koyo Mandiri	Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung	Kasnuri	17 Ekor	Pokir

- b) Sub kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman merupakan kegiatan pemanfaatan potensi genetik hewan guna peningkatan produktivitas, pengembangan varietas unggul, pelestarian spesies lokal, atau pengembangan produk bernilai tambah. Di Kabupaten Blitar, kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk acara gebyar pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan gratis. Melalui gebyar pelayanan ini, para peternak dapat memperoleh manfaat langsung berupa pemeriksaan kesehatan ternak, pengobatan, serta pelayanan inseminasi buatan sebagai upaya meningkatkan kualitas genetik hewan ternak yang dimiliki. Selain itu, untuk meningkatkan ketertarikan siswa/siswi di Kabupaten Blitar, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan kegiatan *Outing Class Agro Kelana* di Kaki Petung Farm, Desa Purvorejo Kecamatan Sanankulon.



Gambar 5. *Outing Class Agro Kelana*

- 2) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang mendukung pelayanan pengujian uji kualitas pakan, diantaranya untuk pembelian bahan pengujian, peralatan pengujian, kalibrasi alat laboratorium, belanja modal alat laboratorium serta fasilitasi dalam rangka surveillance ISO akreditasi Laboratorium Pakan.



Gambar 6.
Jumlah Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar

- a. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, dan pengawasan peredaran obat hewan pada berbagai

unit usaha. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa obat hewan yang beredar memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan demi mendukung kesehatan hewan ternak sebanyak 31 unit usaha di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan.

- 3) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan, berupa kegiatan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan distribusi benih/bibit ternak, HPT, bahan pakan, dan pakan yang dihasilkan maupun beredar. Selain itu, juga mengakomodir kegiatan usulan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan memberikan pelatihan pembuatan pakan ternak untuk memproduksi pakan yang berkualitas dengan bahan lokal, sehingga dapat menekan biaya produksi.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Peningkatan signifikan pada prosentase prasarana peternakan yang layak fungsi ini merupakan keberhasilan dalam optimalisasi prasarana peternakan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus



(DAK) Fisik yang dimanfaatkan untuk merehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia

dan Unggas, sehingga semakin banyak prasarana yang layak fungsi diharapkan dapat mendukung pelayanan peternakan yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, yang didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani berupa Pembangunan Jalan Produksi Peternakan di Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto oleh Poktan Lestari Mulyo secara Swakelola sepanjang 520 meter dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya melalui kegiatan Pembangunan Olahhan Konsentrat Unggas. Kegiatan ini merupakan hibah yang diberikan bagi Kelompok Tani Mekar Sari Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - c) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan melalui rehabilitasi RPH-Unggas di Srengat, rehabilitasi RPH-Ruminansia di Wlingi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dan pemeliharaan RPH-Ruminansia Srengat dalam pemenuhan sarana dan prasarana (pembelian gerobak dorong).
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, peningkatan kesejahteraan hewan, serta pengawasan produk asal hewan agar aman dikonsumsi. Tolak ukur capaian program ini adalah jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Produk peternakan yang tersertifikasi pada Tahun 2024 tercapai 35 unit usaha dari target 34 unit usaha.

Indikator prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai sebesar 93,1% dari target sebesar 90% . Sesuai waktu tanggap yang dimaksud adalah penanganan penyakit hewan menular dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar waktu respon yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut didapatkan dengan perhitungan jumlah penanganan penyakit hewan menular yang tertangani pada tahun 2024 sebanyak 146 kasus dengan

rincian sesuai waktu tanggap 136 kasus (93,1%) dan yang tidak sesuai dengan waktu tanggap sebanyak 10 kasus (6,9) karena adanya keterbatasan petugas dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada akhir tahun. Capaian ini menjadi wujud nyata komitmen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya cepat tanggap, koordinasi yang solid, serta dedikasi petugas lapangan dalam melaksanakan penyidikan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Blitar.

Program ini didukung melalui beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah prosentase kesehatan hewan yang dijamin. Prosentase kesehatan dijamin menggambarkan seberapa besar cakupan penjaminan kesehatan hewan yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terhadap populasi hewan. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 90,9% dari yang ditargetkan sebesar 90%.

JENIS TERNAK	TOTAL VAKSIN	POPULASI AKHIR 2024	FORMULASI PERHITUNGAN	% KESEHATAN DIJAMIN
SAPI	166.097	142.081	$\frac{\text{total populasi}}{\text{populasi akhir}} \times 100$	116,90
KAMBING	360.847	380.742	$\frac{\text{total populasi}}{\text{populasi akhir}} \times 100$	94,77
DOMBA	15.570	19.133	$\frac{\text{total populasi}}{\text{populasi akhir}} \times 100$	81,38
KERBAU	382	361	$\frac{\text{total populasi}}{\text{populasi akhir}} \times 100$	105,82
BABI	1.777	3184	$\frac{\text{total populasi}}{\text{populasi akhir}} \times 100$	55,81
TOTAL				454,68
				=454,68/5
% KESEHATAN DIJAMIN				90,94

Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan:

- a) Penanggulangan daerah wabah terdampak Penyakit Hewan Menular melalui Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk penanggulangan wabah penyakit melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali dengan target sebanyak 7 laporan dan terealisasi sebanyak 9 laporan (128%),

Lokasi sasaran terdampak wabah yang terkendali Tahun 2024

No	Wilayah Desa
1	Desa Ngembul Kec. Binangun
2	Desa Maliran Kec. Ponggok
3	Desa Boro Kec. Selorejo
4	Desa Sumberjo Kec. Sanankulon
5	Desa Tlogo Kec. Kanigoro
6	Desa Jablog Kec. Talun
7	Des Purwokerto Kec. Srengat
8	Desa Gadungan Kec. Gandusari
9	Desa Tuliskriyo Kec. Sanankulon

- b) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan sebanyak 12 wilayah di Kabupaten Blitar.

Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan Tahun 2024

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jumlah sampel	Jumlah peternak	Hasil Presentase POSITIF
1	Wilayah Puskesmas Nglegok : Kai.Nglegok Kec. Nglegok	Nglegok 1 - 20	20	3	0 %
	Desa Sumberasri Kec. Nglegok	Sumberasri 1 - 20	20	3	0 %
2	Wilayah Puskesmas Kademangan : Desa Darungan Kec. Kademangan	Darungan 1 - 20	20	4	0,357 %
	Desa Jimbe Kec. Kademangan	Jimbe 1 - 20	20	3	0,357 %

3	Wilayah Puskesmas Srengat : Desa Kalipucung Kec. Sanankulon	Kalipucung 1 - 20	20	3	0 %
	Desa Bendosari Kec. Sanankulon	Bendosan 1 - 20	20	3	0 %
4	Wilayah Puskesmas Bakung : Desa Lorejo Kec. Bakung	Lorejo 1 - 20	20	3	0,357 %
	Desa Tumpakoyot Kec. Bakung	TP. Oyot 1 - 20	20	3	0 %
5	Wilayah Puskesmas Binangun : Desa Sukorejo Kec. Wates	Sukorejo 1 - 20	20	5	0 %
	Desa Sumberkembar Kec. Binangun	Sumberkembar 1 - 20	20	8	0 %
6	Wilayah Puskesmas Wingi : Desa Mronjo Kec. Selopuro	Mronjo 1 - 40	40	5	0 %
	Desa Ploso Kec. Selopuro	Ploso 1 - 40	40	4	0 %
TOTAL		12 Desa	280	47	1,071 %

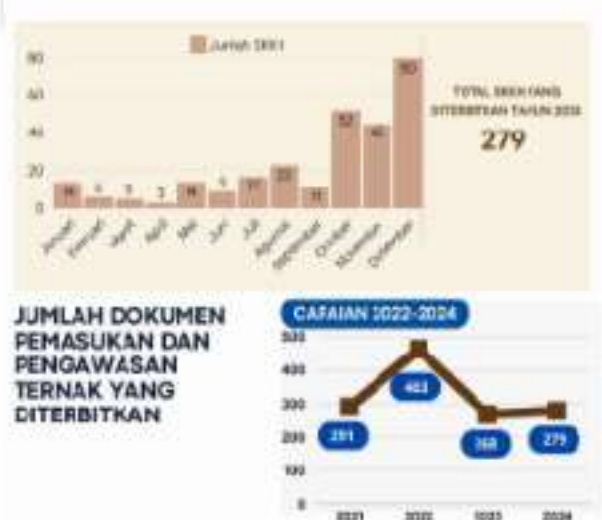
- c) Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan target sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus (133%) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kasus	Keterangan
1.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Investigasi kasus suspek PMK di Desa Penataran Kec. Nglegok dan Desa Wonorejo Kec. Ngaglik
2.	Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD)	Investigasi kasus di Kel. Jegu Kec. Sutojayan, Ds. Kalitengah Kec. Panggunrejo
3.	Avian Influenza (AI)	Investigasi KIE kematian ternak puyuh di Kel. Babadan Kec. Wingi
4.	Intoksikasi	Investigasi kasus kematian kambing di

		Ds. Pojok Kec. Garum dan Investigasi kasus kematian kambing di Kel. Dandong Kec. Srengat
--	--	--

2) Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

Daerah
Kabupaten/Kota
yang didukung 1
(satu) sub
kegiatan yaitu
Pengawasan atas
Penerapan
Persyaratan
Teknis untuk
Pemasukan
dan/atau
Pengeluaran



Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) berupa pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah utamanya yang akan dikirim ke luar provinsi/ luar pulau serta memonitor kesehatan hewan yang dilalulintaskan di pasar-pasar hewan di Kabupaten Blitar ataupun hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar dari daerah lain. Pada tahun 2024 telah memfasilitasi 279 laporan.

3) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; merupakan pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan



Gambar 7.
Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium

- b) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; Dinas Peternakan dan Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan hewan yang terbaik bagi masyarakat. Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner telah dilaksanakan oleh UPT Puskesmas yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, dengan dukungan 12 Puskesmas: Kademangan, Srengat, Talun, Binangun, Kesamben, Nglegok, Selorejo, Wlingi, Ponggok, Wonodadi, Bakung, dan Panggungrejo.

Pelayanan jasa medik veteriner meliputi pencegahan dan penanganan penyakit hewan, baik untuk ternak besar maupun hewan kecil/hewan kesayangan. Layanan pencegahan mencakup pemberian vaksin, vitamin, dan obat lainnya sedangkan layanan penanganan penyakit mencakup pengobatan penyakit umum maupun penyakit wabah.

Dengan indikator berupa jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target yang ditetapkan sebanyak 2.000 laporan berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 2.110 laporan (105,5%). Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta kerja keras petugas medis veteriner di seluruh Puskesmas. Upaya ini menjadi komitmen kami dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung kesejahteraan peternak di Kabupaten Blitar.

- 4) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang didukung 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan berupa pengendalian dan pemantauan terhadap distribusi, penjualan, dan peredaran hewan serta produk hasil hewan dengan pengambilan sampel produk asal hewan di Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, bakso) untuk diperiksa secara organoleptis pada Laboratorium Kesmavet sebanyak 52 laporan dengan jenis sampel daging ayam, daging sapi, telur, susu, bakso, sosis dan nugget.
 - b) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan melakukan pemeriksaan sampel produk pangan asal hewan lanjutan ke laboratorium rujukan (UPT Laboratorium Keswan Pakis Malang, EAVET Boyolali dan BBVET Wates) untuk mendapatkan pemeriksaan lebih spesifik (Mikrobiologi, Elisa dll) terkait jaminan produk hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang beredar di Kabupaten Blitar
 - c) Pembinaan Penerapan Persyaratan Hygiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan berupa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada unit usaha yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 39 laporan berupa rekomendasi NKV.
- 5) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan berupa pemantauan penyembelihan hewan kurban di seluruh desa dan kelurahan dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Blitar.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tolak ukur kinerja program ini adalah prosentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Tahun 2024 realisasi kinerja program ini tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Realisasi capaian dihitung dengan perhitungan total prosentase penyelesaian dari semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan dari yang ditargetkan sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota melalui kegiatan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis bertujuan meminimalisir risiko terjadinya wabah hewan yang akan beresiko terhadap kelangsungan perkembangan dunia peternakan dan penurunan produksi ternak. Adapun jenis kegiatannya yaitu investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) dan investigasi ternak terdampak bencana di 8 wilayah. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
Tolak ukur kinerja program ini berupa peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2024 tercapai 7% dari target yang ditetapkan yaitu 5% yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2023 dengan capaian pengajuan rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2024. melalui Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan sebanyak 32 laporan yang merupakan pengawasan terhadap praktik medik veteriner dan paramedik veteriner di Kabupaten Blitar.
- f. Program Penyuluhan Pertanian; Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2024 tercapai 9,2% dari 8% yang ditargetkan dan didapatkan dari perbandingan total peternak terampil pada tahun 2024 (273 peternak) terdiri dari pengembangan kapasitas 143 orang, pelatihan pembuatan pakan 90 orang dan sosialisasi olahan pakan 40 orang dibandingkan peternak terampil di tahun 2023 (250 peternak). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kompetensi peternak, sehingga mampu mendorong produktivitas dan kualitas usaha peternakan di daerah. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yaitu pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan sub kegiatan

pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa dengan capaian 14 unit kelompok. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak entog dan fasilitasi usulan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP)



Gambar 8. Pelatihan budidaya ternak ruminansia

Selain dukungan program di atas, dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan juga melakukan inovasi pelayanan sebagai berikut :

a. Outing Class Agro Kelana

Kegiatan outing class tahun 2024 dilaksanakan di Kali Petung Farm, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon pada tanggal 21 Agustus 2024. Kegiatan outing class merupakan kegiatan yang diikuti oleh siswa/i setingkat TK dan SD, dengan agenda kegiatan antara lain : pembukaan dan sambutan, dongeng dan pantomim, agro kelana (jalan-jalan ke kandang), memberi pakan ternak, KIE dari dokter hewan, membaca buku bersama dan diakhiri dengan pemberian snack dan ikan. kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah wawasan tentang peternakan sejak dini, membangkitkan jiwa enterpreneur, memperkenalkan tentang profesi di bidang peternakan, seperti peternak, dokter hewan, dll serta untuk memberikan edukasi tentang manajemen ternak.

Tahun 2024, Dinas Peternakan dan Perikanan memperoleh beberapa prestasi di bidang peternakan yaitu:

a. Juara II Petugas Inseminasi Buatan (IB) Berprestasi

- b. Sebagai Pemerintah Daerah Pelopor Mandatory Halal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di Provinsi Jawa Timur
- c. Peringkat 2 Lomba Manajemen Agribisnis Kelompok Tingkat Provinsi komoditas komoditas ternak ruminansia (kambing/domba)
4. Penghargaan Peringkat 2 Lomba Manajemen Agribisnis Kelompok Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 komoditas ternak ruminansia

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan adalah sebagai berikut.

1. Melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada akhir tahun Desember 2024 yang mengakibatkan beberapa ternak mati.
2. Masih adanya prasarana peternakan yang tidak layak fungsi.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan adalah sebesar Rp. 8.567.217.724,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.209.195.090,-. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan.

Tabel 3.17

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	105,6%	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	1.003.248.165,00	919.370.177,00	91,64
			<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme</i>	749.667.048,00	683.125.960,00	91,12

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	743.615.098 ,00	677.350.96 0,00	91,09
			Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6.051.950,0 0	5.775.000,0 0	95,42
			Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	158.581.425 ,00	144.499.31 2,00	91,12
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	158.581.425 ,00	144.499.31 2,00	91,12
			Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pegecer	4.999.960,0 0	4.999.900,0 0	100,00
			Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	4.999.960,0 0	4.999.900,0 0	100,00
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.999.732, 00	86.745.005, 00	96,38

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	89.999.732, 00	86.746.005, 00	96,38
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.940.100.0 20,00	4.806.325. 960,00	97,29
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	4.940.100.0 20,00	4.806.325.9 60,00	97,29
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	317.245.000 ,00	317.244.70 0,00	100,00
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	431.000.000 ,00	415.745.91 3,00	96,46
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.191.855.0 20,00	4.073.335.3 47,00	97,17
			Program Fengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.498.182.4 55,00	2.371.156. 987,00	94,92
			Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	19.999.182, 00	19.475.375, 00	97,38

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	9.999.640,0 0	9.967.975,0 0	99,68
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	5.000.000,0 0	4.960.000,0 0	99,20
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	4.999.542,0 0	4.547.400,0 0	90,96
			Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.999.980,0 0	9.698.500,0 0	96,99
			Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	9.999.980,0 0	9.698.500,0 0	96,99
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.371.241,8 21,00	2.210.742,5 30,00	94,79

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	84.341.821, 00	80.011.300, 00	94,87
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2.286.900,0 00,00	2.167.731,2 30,00	94,79
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	35.281.863, 00	33.789.482, 00	95,77
			Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10.956.184 00	10.014.000, 00	91,40
			Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.406.167,0 0	4.875.482,0 0	90,18
			Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	18.919.512, 00	18.900.000, 00	99,90
			Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	61.659.609, 00	60.451.100, 00	98,04
			Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	61.659.609, 00	60.451.100, 00	98,04
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.499.720,0 0	7.497.940, 00	99,98
			Kegiatan	7.499.720,0	7.497.940,0	99,98

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0	0	
			Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	7.499.720,0	7.497.940,0	99,98
			Program Perizinan Usaha Pertanian	4.999.960,0	4.999.900,00	100,00
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4.999.960,0	4.999.900,0	100,00
			Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	4.999.960,0	4.999.900,0	100,00
			Program Penyuluh Pertanian	113.187.404,00	99.844.126,00	88,21
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	113.187.404,00	99.844.126,00	88,21
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	113.187.404,00	99.844.126,00	88,21

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
			Realisasi Anggaran	8.567.217,7 24,00	8.209.195,0 90,00	95,82
			Tingkat efisiensi			1,1%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 105,6% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 95,82%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan dengan nilai efisiensi sebesar 1,1% dengan kategori efisien.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus penyakit untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor peternakan;
2. Pembangunan/rehabilitasi prasarana peternakan untuk pengoptimalan pelayanan di Dinas Peternakan dan Perikanan.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi kinerja dan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya	Nilai dan predikat	70,4/B B	73,4/BB	104	9.852,55 2.607,00	9.516.745 262,00	96,55

	akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	SAKIP perangkat daerah						
2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi hasil perikanan	0,1%	-5,77%	-5770	663.44 4.569,0 0	602.373.3 82,00	90,79 %
3	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	0,16%	0,21%	0,34%	8.567.2 17.724, 00	8.209.195 .090,00	95,82
		Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Na	91%	92,3%			
		Prosentase produk peternakan yang layak edar	95,05%	97%	97,9%			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan kategori sangat tinggi, sasaran meningkatnya produksi hasil perikanan dengan kategori sangat rendah dan sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan dengan kategori sangat tinggi. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pengaruh fluktuasi cuaca dan perubahan iklim terhadap produksi perikanan. Cuaca ekstrim, terutama yang disertai angin kencang, gelombang tinggi, dan badai, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan produksi perikanan tangkap;
2. Masih rendahnya permintaan pasar terhadap ikan hias terutama ikan koi;
3. Tingginya harga pakan ikan yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual ikan;
4. Keterbatasan akses pemasaran produk hasil olahan perikanan.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Pelaksanaan diversifikasi usaha nelayan dan fasilitasi Fasilitasi sekolah lapang cuaca Nelayan dari BMKG
2. Pelatihan pengolahan pakan mandiri untuk mengimbangi harga pakan yang tinggi
3. Fasilitasi event Blitar Koi Show 2024

C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong nelayan untuk melakukan usaha alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada hasil tangkap laut;
2. Peningkatan promosi dan edukasi pasar untuk ikan hias;
3. Pelatihan pengolahan pakan mandiri untuk mengimbangi harga pakan yang tinggi;
4. Mendorong sertifikasi produk olahan seperti SNI, BPOM, dan halal untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja**
- B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024**
- C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO SUSANTO, ST., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Jabatan : Pjs. Bupati Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,



Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Pihak Pertama



EKO SUSANTO, ST., M.Si
NIP. 196907011997031003

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,1
2	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (%)	0,3
		Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar (%)	97
		Prosentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	91
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	70,1/BB

Program	Anggaran	Keterangan
Program Utama		
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	289.492.836	Sektor Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	335.000.000	
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.960.000	
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733	
5. Program Peryediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.003.248.165	Sub Sektor Peternakan
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.940.100.020	DAK Fisik
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.498.182.455	DAK Nonfisik dan DAU
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.499.720	
9. Program Perizinan Usaha Pertanian	4.999.960	
10. Program Penyuluhan Pertanian	113.187.404	
Program Penunjang		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	9.852.352.607	Rutin
Total	Rp 19.083.014.900,00	



Blitar, 31 Oktober 2024
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan



TV C/ Pembina Utama Muda
NIP. 196907011997031003



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan Cokroaminoto No. 22 Telp./Fax. (0342) 801136
Email : disnakkab@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B/662.02/47/409.28.1/SK/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan g ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan

- bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 26 September 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN,



EKO SUSANTO, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907011997031003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN NYERUKA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PESANGGUNG JAWAB
Meningkatkan efisiensi pelayanan peternakan dan perikanan	Kontribusi PDNS Sektor Perikanan	Meningkatnya Akumulasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan persentase RAIKP perangkat daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspektoran	Kepala Dinas
	Kontribusi PDNS Sektor Perikanan	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan rumusan: $\frac{\text{Produksi tsn } n - \text{Produksi tsn } n-1}{\text{Produksi tsn } n-1} \times 100$	Wilayah Perikanan Tangkap Wilayah Perikanan Budidaya	Kepala Dinas
	Kontribusi PDNS Sub Sektor Peternakan	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	Persentase peningkatan produktivitas ternak	Peningkatan parameter produktivitas ternak, dengan rumusan: $\frac{\text{Produktivitas tsn } n - \text{Produktivitas tsn } n-1}{\text{Produktivitas tsn } n-1} \times 100$	Wilayah Budidaya dan Pengembangan Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan	
			Persentase wilyah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Pertahanan jumlah wilyah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar, dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah desa yang terkendali}}{\text{Jumlah total desa di Kabupaten Blitar}} = 100\%$	Wilayah Kesehatan Hewan dan Kesehatan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BARANG BERTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERANGKUNO JAWAR
			Prosentase produk peternakan yang layak edar	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan jumlah layak edar dengan jumlah produk yang diarsip dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah produk layak edar}}{n} \times 100\%$ Jumlah produk yang diarsip	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Kepala Dinas

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN,



EKO SUSANTO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907011997001000

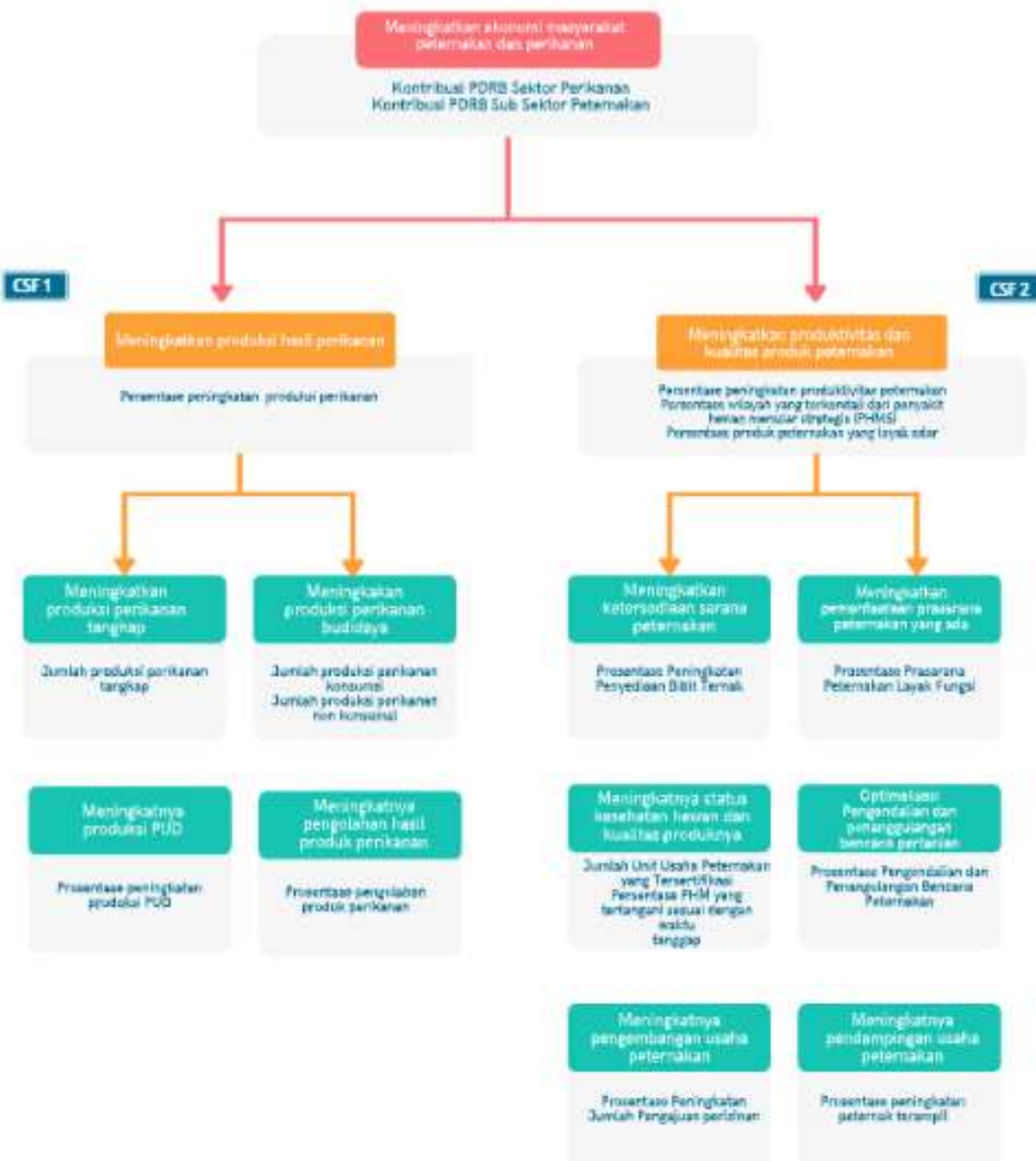


PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**DOKUMEN
PENJENJANGAN
KINERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan





Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

CSF 1

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan

Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatkan produksi perikanan tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

Meningkatkan produksi perikanan budidaya

Jumlah produksi perikanan konsumsi
Jumlah produksi perikanan non konsumsi

Meningkatnya produksi PUD

Persentase peningkatan produksi PUD

Meningkatnya pengolahan hasil produk perikanan

Persentase pengolahan produk perikanan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil

Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan

Meningkatnya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Jumlah Produksi Perikanan di TPI

Tertarikannya Pendaftaran Kapal Perikanan

Jumlah Kapal Perikanan yang terdaftar

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan

Optimalisasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD (Perairan Umum Darat)

Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

CSF 1

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produktivitas perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kualitas produk peternakan

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit
hewan menular strategis (PrMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatkan
produktivitas perikanan
tangkap

Jumlah produksi perikanan
tangkap

Meningkatkan
produktivitas perikanan
budidaya

Jumlah produksi perikanan
karsinasi
Jumlah produksi perikanan
non-konsumsi

Meningkatnya
produktivitas PUD

Persentase peningkatan
produktivitas PUD

Meningkatnya
pengolahan hasil
produk perikanan

Persentase pengolahan
produk perikanan

Meningkatnya
pembudidayaan
Pembudidayaan ikan kecil

Jumlah Pembudidayaan ikan
kecil yang dibudidayakan

Meningkatnya
Pengelolaan
Pembudidayaan ikan yang
dikonsumsi

Jumlah Pengelolaan
Pembudidayaan ikan yang
dikonsumsi

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah wilayah Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah kawasan Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah kawasan Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah wilayah Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah wilayah Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah wilayah Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

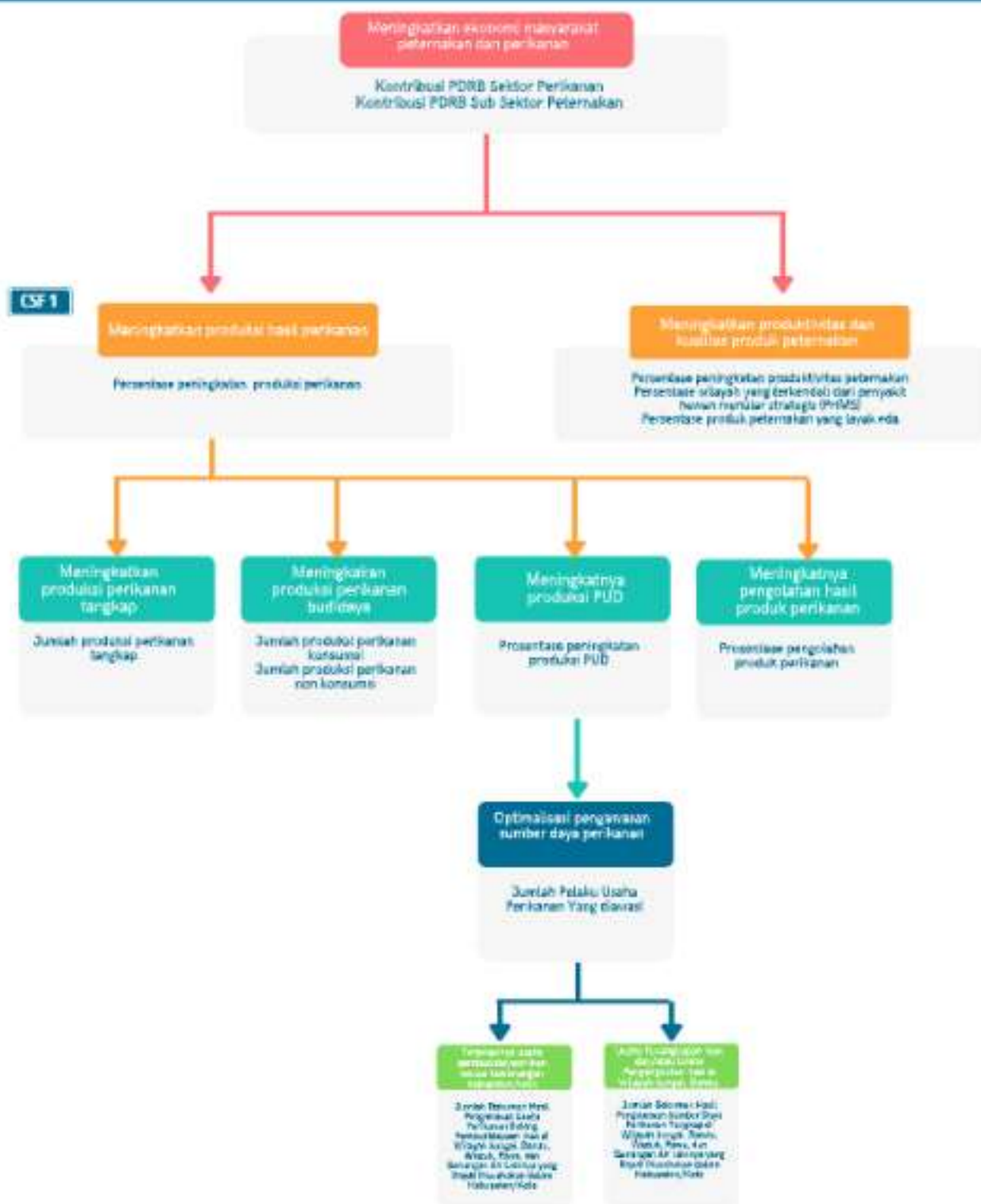
Jumlah kawasan Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil

Jumlah kawasan Perikanan
Meningkatnya Pengelolaan
Kualitas Perikanan Ikan
kecil



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan





Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

CSF 1

Meningkatkan produktivitas hasil perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kuantitas produk peternakan

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit
kewan menular strategis (PMMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatkan
produksi perikanan
tangkap

Jumlah produksi perikanan
tangkap

Meningkatkan
produksi perikanan
budidaya

Jumlah produksi perikanan
konsumsi
Jumlah produksi perikanan
non konsumsi

Meningkatnya
produksi PUD

Persentase peningkatan
produksi PUD

Meningkatnya
pengolahan hasil
produk perikanan

Persentase pengolahan
produk perikanan

Fasilitasi Penertiban Tanda
Daftar Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan bagi Usaha
Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Fasilitasi Tanda
Daftar Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan

Meningkatnya jumlah usaha perikanan yang terfasilitasi dengan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan

Jumlah izin dan informasi
usaha perikanan dan
pengolahan hasil perikanan
berdasarkan skala usaha
dan status

Optimalisasi Pendataan Mula
dan Keamanan Hasil Perikanan
Bagi Usaha Pengolahan dan
Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Pelaku Usaha yang
dibina dalam hal mutu dan
keamanan hasil perikanan

Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dengan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan

Jumlah izin usaha
pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan yang
mendukung produksi
terhadap penguatan
pemasaran hasil perikanan
berdasarkan skala usaha
pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan sesuai skala
usaha dan status

Meningkatnya penyediaan
dan pemasaran bahan baku
industri pengolahan ikan

Jumlah Produksi Bahan Baku
industri Pengolahan ikan
yang disediakan

Meningkatnya ketersediaan bahan baku perikanan yang terfasilitasi

Jumlah izin usaha
pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan yang
mendukung produksi
terhadap penguatan
pemasaran hasil perikanan
berdasarkan skala usaha
pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan sesuai skala
usaha dan status

Meningkatnya jumlah usaha perikanan yang terfasilitasi dengan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan

Jumlah pelaku usaha
perikanan skala mikro dan
kecil dalam 1 (satu) daerah
kawasan usaha yang
terfasilitasi



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produksi hasil perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kuantitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit
kewan menular strategis (PMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya
keberhasilan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Penjualan SDG Ternak

Meningkatnya
pembinaan program
peternakan yang ada

Persentase Peningkatan
Peternakan Layak Pangan

Meningkatnya status
keselamatan hewan dan
keamanan produknya

Jumlah peternakan ternak
yang terbebas
dari penyakit zoonosis
menular yang berisiko
kearah orang-orang
terdekat

Optimalisasi
Pengendalian dan
pengawasan ternak
peternakan

Persentase Peningkatan dan
Peningkatan Jumlah
Peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Jumlah Penjualan per ekor

Meningkatnya
pembinaan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
peternakan ternak

Meningkatnya Penjualan
SDG Hewan

Jumlah Fasilitas
Penjualan SDG

Meningkatnya jumlah pakan
yang layak

Jumlah BBL (pakan ternak
yang layak)

Optimalisasi Pengawasan
Obat Hewan di Tingkat
Pegawai

Jumlah Usaha Peredaran
Obat Hewan yang diawasi

Meningkatnya penjualan
pakan ternak mandiri

Jumlah Unit Usaha pakan
ternak yang dikembangkan dan
diawasi

Meningkatnya Kualitas
Pakan

Persentase Kualitas SDG
Hewan Ternak

Meningkatnya Jumlah
Pakan

Tersertifikasinya SDG
Hewan Ternak

Meningkatnya Kualitas dan
Keamanan Produk
Obat Hewan Ternak

Jumlah Peternakan Sederhana
Faktor Pakan, Kesehatan
Hewan Pakan Ternak yang
Berada

Optimalisasi Pengawasan
Obat Hewan di Tingkat
Pegawai

Jumlah Peternakan Hewan
Kandang dan Peternakan Obat
Hewan yang Berada

Meningkatnya Fasilitas
Pakan Pakan/Pakan

Jumlah Peternakan
Peternakan SDG Ternak
dan UFT, Selain
Faktor Pakan



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produktivitas perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kualitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase siklus yang terkontrol dari penyakit
hewan melalui strategi (PrMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya
ketersediaan sarana
peternakan

Persentase Peningkatan
Penyediaan Sarana
Peternakan

Meningkatnya
perumahan peternak
peternakan yang layak

Persentase Perumahan
Peternakan Layak Fungsi

Meningkatnya status
keamanan pangan dan
kualitas produknya

Jumlah peternak yang memiliki
sertifikasi keamanan pangan
peternakan yang terintegrasi
dengan sektor pangan

Optimalisasi
Pengendalian dan
pencegahan penyakit
peternakan

Persentase Peternak yang
terintegrasi dengan
kegiatan kesehatan
peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Jumlah Peternakan per orang

Meningkatnya
pendampingan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
pendampingan usaha
peternakan

Meningkatnya penyediaan
sarana peternakan

Jumlah Prasarana
Peternakan yang dibangun,
diperbaiki dan terpeliharai

Terwujudnya sarana dan
prasarana peternakan yang
layak digunakan

Jumlah sarana peternakan
yang dibangun, diperbaiki
dan terpeliharai

Terwujudnya perumahan dan
sarana peternakan yang layak
digunakan

Jumlah Perumahan Peternakan
Layak yang dibangun,
diperbaiki dan terpeliharai

Terwujudnya status keamanan
pangan dan kualitas produk
peternakan

Jumlah peternak yang
sertifikasi keamanan pangan
peternakan terintegrasi
dengan sektor pangan

Optimalisasi
Pengendalian dan
pencegahan penyakit
peternakan

Persentase Peternak yang
terintegrasi dengan
kegiatan kesehatan
peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Jumlah Peternakan per orang

Meningkatnya
pendampingan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
pendampingan usaha
peternakan



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan

Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya aksesibilitas sarana peternakan

Persentase Pemukiman Persebaran SDA (Jarak)

Meningkatnya persentase pemukiman peternakan yang ada

Persentase Pemukiman Peternakan Layak Fungsi

Meningkatnya status kesehatan hewan dan kualitas produksinya

Jumlah sapi (sapi peranakan yang terbebas dari penyakit menular yang terancam) serta ternak unggas, kelinci

Optimalisasi Pengendalian dan Penyelenggaraan Samsara Peternakan

Persentase Pemukiman dan Penyelenggaraan Samsara Peternakan

Meningkatnya pengembangan usaha peternakan

Persentase Pemukiman Jumlah Pemukiman perikanan

Meningkatnya pengembangan usaha perikanan

Persentase pemukiman perikanan terampil

Meningkatnya Penguasaan Keahlian Dasar

Persentase Keahlian hewan yang dijinis

Meningkatnya Penguasaan Pemukiman dan Perumahan Dasar

Jumlah Dukungan Pemukiman dan Perumahan Ternak yang di berikan

Optimalisasi Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner yang dijinis

Optimalisasi Pemukiman dan Penguasaan Perumahan Teknis Keahlian Masyarakat Veteriner

Jumlah unit usaha dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Optimalisasi Pemukiman dan Penguasaan Perumahan Teknis Keahlian Hewan

Jumlah Unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah Desa Terjangkau (Jarak yang ditempuh dari lokasi pemukiman ke lokasi perikanan)

Jumlah wilayah yang dijinis pemukiman dan perikanan

Jumlah Desa Terjangkau (Jarak yang ditempuh dari lokasi pemukiman ke lokasi perikanan)

Jumlah wilayah yang dijinis pemukiman dan perikanan

Jumlah dukungan pemukiman dan perumahan ternak yang di berikan

Jumlah dukungan pemukiman dan perumahan ternak yang di berikan

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner yang dijinis

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner yang dijinis

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner yang dijinis

Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medis Veteriner yang dijinis

Jumlah unit usaha dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya

Jumlah unit usaha yang dijinis dan dijinis perikanan teknis keahliannya



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produktivitas perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kualitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit
hewan menular strategis (PnMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya
ketersediaan sarana
peternakan

Persentase Peningkatan
Persebaran Bait Ternak

Meningkatnya
perumahan peternak
peternakan yang ada

Persentase Perumahan
Peternakan Layak Fungsi

Meningkatnya status
keamanan pangan dan
kualitas produknya

Jumlah total tidak layak
fungsi dan terdistribusi
kepada penduduk yang
mendapat asupan gizi yang
baik

Optimalisasi
Pengendalian dan
pencegahan penyakit
tertentu

Prosedur, Protokol dan
Peningkatan Sarana
Peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Jumlah Peternakan per orang

Meningkatnya
pendampingan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
pelayanan peternak

Meningkatnya Pengendalian
dan Penanggulangan
Bencana Peternakan

Jumlah Bencana Peternakan
yang di tangani dan
dikendalikan

Meningkatnya Persebaran
dan Penanggulangan
Kain yang Berbahaya

Jumlah Wilayah
Penanggulangan Bencana dan
Kain yang Berbahaya



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produktivitas hasil perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kuantitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terbebas dari penyakit
kewan menular strategis (PMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya
keberhasilan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Penjualan DDT Ternak

Meningkatnya
persentase produksi
peternakan yang ada

Persentase Peningkatan
Peternakan Layak Fungsi

Meningkatnya status
keselamatan hewan dan
kualitas produksinya

Kurangnya kasus penyakit hewan yang
menyebabkan kerugian ekonomi yang
menyebabkan kerugian ekonomi yang
menyebabkan kerugian ekonomi yang

Optimalisasi
Peningkatan dan
penyediaan sarana
peternakan

Persentase Peningkatan dan
Penyediaan Sarana
Peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Peningkatan
Jumlah Penjualan perikanan

Meningkatnya
pembangunan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
peternakan ternak

Facility Penjualan dan
Usaha Mula dan Perikanan

dan usaha Peternakan DDT Ternak dan Peternakan, Fasilitas
Perumahan Hewan, Fasilitas
Gali Hewan, Peralatan Hewan,
Bahan Pakan Hewan yang
diperlukan

Perbaikan dan Peningkatan
Usaha Mula dan Perikanan

dan usaha DDT Ternak dan Perikanan, Fasilitas
Perumahan Hewan, Fasilitas
Gali Hewan, Peralatan Hewan,
Bahan Pakan Hewan yang
diperlukan, dan
Fasilitas Hewan yang



Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Meningkatkan ekonomi masyarakat
peternakan dan perikanan

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatkan produktivitas perikanan

Persentase peningkatan produktivitas perikanan

Meningkatkan produktivitas dan
kualitas produk peternakan

CSF 2

Persentase peningkatan produktivitas peternakan
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit
hewan menular strategis (PnMS)
Persentase produk peternakan yang layak eda

Meningkatnya
ketersediaan sarana
peternakan

Persentase Peningkatan
Persentase Bait Ternak

Meningkatnya
perumahan peternak
peternakan yang ada

Persentase Perumahan
Peternakan Layak Fungsi

Meningkatnya status
keamanan pangan dan
kualitas produknya

Jumlah total kakorvenema
yang teridentifikasi
Kontaminasi mikroba
mencapai tingkat yang
aman untuk dikonsumsi

Optimalisasi
Pengendalian dan
pencegahan penyakit
peternakan

Persentase Persepsi Peternak dan
Peternak Unggulan Bersedia
Peternakan

Meningkatnya
pengembangan usaha
peternakan

Persentase Persepsi
Jumlah Peternak perorangan

Meningkatnya
pendampingan usaha
peternakan

Persentase peningkatan
pendampingan usaha
peternakan

Meningkatnya pelaksanaan
Penyuluhan Peternakan

Jumlah Peternak yang
mengikuti kegiatan Penyuluhan
Peternakan yang ditetapkan

Meningkatnya pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Peternak
Unggulan dan Peternak
Unggulan

Jumlah Peternak yang
diidentifikasi Peternak
Unggulan dan Peternak
Unggulan yang ditetapkan



**CASCADING
DINAS
PETERNAKAN
DAN PERIKANAN**



No	Kategori	Nama	Jenis	Merk	Spesifikasi	Keterangan	Merk	Spesifikasi	Keterangan	Jumlah		Total
										Unit	Volume	
1	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
2	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
3	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
4	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
5	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
6	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
7	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
8	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
9	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000
10	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	1	1000	1000
										2	1000	2000
										3	1000	3000
										4	1000	4000

No.	Name of the Candidate	Age	Sex	Religion	Caste	Education	Occupation	Marks		Total	Grade	Remarks
								1	2			
								14	8			
								10	10			
								1				
								2				
								3				
								4				
								5				
								6				
								7				
								8				
								9				
								10				
								11				
								12				
								13				
								14				
								15				
								16				
								17				
								18				
								19				
								20				
								21				
								22				
								23				
								24				
								25				
								26				
								27				
								28				
								29				
								30				
								31				
								32				
								33				
								34				
								35				
								36				
								37				
								38				
								39				
								40				
								41				
								42				
								43				
								44				
								45				
								46				
								47				
								48				
								49				
								50				

1. Name of the person
2. Address
3. City

4. State
5. Zip
6. Telephone

7. Birth date
8. Sex
9. Race

10. Education
11. Occupation

12. Marital status
13. Number of children

14. Annual income
15. Assets

16. Liabilities
17. Net worth

18. Social Security number
19. Other identification

20. Date of report
21. Signature

22. Title
23. Agency

24. Date of birth
25. Sex

26. Race
27. Education

28. Occupation
29. Marital status

30. Number of children
31. Annual income

32. Assets
33. Liabilities

34. Net worth
35. Social Security number

36. Other identification
37. Date of report

38. Signature
39. Title

40. Agency
41. Date of birth

42. Sex
43. Race

44. Education
45. Occupation

46. Marital status
47. Number of children

48. Annual income
49. Assets

50. Liabilities
51. Net worth

52. Social Security number
53. Other identification

54. Date of report
55. Signature

56. Title
57. Agency

58. Date of birth
59. Sex

